

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak lama pemerintah Indonesia telah memiliki perhatian yang khusus kepada entitas pendidikan Islam seperti pesantren terbukti dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap pesantren sebagai salah satu sumber entitas penting bagi perekonomian nasional. Hal ini tampak dalam agenda ISEF (*Indonesia Sharia Economic Festival*) yang digelar Bank Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2017, ISEF kembali diselenggarakan di Surabaya dengan tema “*Fostering Inclusive Economic Growth and Improving Resilency through Closer Collaboration and Coordination*”. Tema tersebut tampaknya menunjukkan kepercayaan yang baik bagi bank sentral dalam menggabungkan pengembangan sektor keuangan dan sektor riil. Kepercayaan ini makin jelas dengan diadakannya *stakeholder* syariah termasuk 80 pimpinan pondok pesantren di seluruh Indonesia dalam rangkaian agenda ISEF 2017 (Bank Indonesia, 2017). Ini merupakan upaya nyata pemerintah Indonesia memberdayakan pondok pesantren untuk menggerakkan ekonomi secara menyeluruh yang dibuktikan dengan inisiasi Bank Indonesia (BI) yang bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam menerbitkan dan mensosialisasikan Pedoman Akuntansi Pesantren yang mulai berlaku efektif 28 Mei 2018. Pedoman ini tetap mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada entitas laba maupun entitas pesantren membutuhkan perhatian masyarakat maupun anggota entitas tersebut. Perkembangan tersebut membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Namun, selama ini pondok pesantren dianggap terbatas dan tertutup dari manajemen modern. Karena pada umumnya kepemimpinan serta tata kelola di pondok pesantren masih banyak yang sifatnya alami dan tradisional. Baik dari pengembangan pesantren, proses pembinaan calon pimpinan, maupun pengelolaan keuangannya belum memiliki bentuk yang teratur dan menetap. Hal ini disebabkan pondok pesantren resisten dari praktik akuntabilitas karena kuatnya pengaruh pemimpin dan tradisi didalamnya (Fidiana, 2018).

Nadzir (2015) dan Faozan (2006) menyatakan bahwa pondok pesantren saat ini bukan lagi sekedar menjadi entitas pencetak pemikir agama (*center of excellence*) dan entitas pencetak sumber daya manusia (*human resource*), tapi juga dapat difungsikan sebagai entitas pemberdaya masyarakat (*agent of development*). Fakta ini dapat dibuktikan dengan eksistensi dan potensi pondok pesantren dalam mengembangkan ekonomi berbasis rakyat yang mana pesantren selain bergerak dalam bidang pendidikan umumnya juga mengelola unit-unit bisnis dan koperasi yang dikenal dengan *baitul maal wat tamwil* (BMT). Unit-unit bisnis pondok pesantren ini biasanya digunakan sebagai pencetak pendapatan untuk membiayai kegiatan pondok pesantren yang selama ini masih mengenakan biaya hidup yang rendah bagi santrinya. Namun, nyatanya perkembangan pondok pesantren di Indonesia masih hanya sebatas perbaikan fasilitas penunjang pendidikan, bukan

perkembangan kearah sistem maupun manajemen pondok pesantren itu sendiri. Perubahan yang sudah terjadi hanya sebatas kepengurusan, bukan pada pengelolaan keuangan secara transparan yang mengarah pada laporan pertanggungjawaban. Syamsudin (2017) mengakui minimnya pengetahuan kyai atau santri dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang bersifat keuangan. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa pondok pesantren umumnya fokus pada pelaksanaan program utama dan seringkali tidak mementingkan kegiatan administrasi. Pondok pesantren merasa bahwa mereka adalah entitas yang terpercaya (amanah) sehingga tidak harus tertelusur secara administrasi.

Seperti halnya perusahaan, pondok pesantren juga membutuhkan ilmu akuntansi untuk mencatat pengeluaran dan pendapatannya. Akuntansi lahir tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu, yakni untuk memberikan jasa kepada penggunanya dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Guna memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada masyarakat maka pondok pesantren juga dituntut untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan atau standar yang telah ada berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar ini juga mengatur bagaimana model pencatatannya dan pelaporannya. Penyusunan laporan keuangan dengan standar SAK ETAP membuat laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparansi bagi para pengguna (*users*) sehingga para pengguna ini dapat melihat aktivitas program yang telah dijalankan beserta anggaran yang telah dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana dari para donatur.

Di era globalisasi seperti sekarang ini akuntansi juga dapat digunakan pondok pesantren untuk membantu dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di bidang keuangan. Keputusan yang telah diambil tidak hanya berpengaruh kepada kondisi keuangan yang ada di pondok pesantren, namun juga pihak-pihak yang berkepentingan dengan pondok pesantren. Bentuk konkrit yang dilakukan oleh pondok pesantren adalah dengan cara membenahi administrasinya serta mempublikasikan laporan keuangannya setiap tahun (Rizky dan Padmono, 2013). Namun, pada kenyataannya masih banyak entitas pesantren yang masih belum menggunakan pedoman atau acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dipakai pun masih sangat sederhana, dimana entitas tersebut tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar pada entitas nirlaba umumnya yang telah menerapkan pedoman SAK ETAP. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang relevan sehingga informasi keuangan yang diperoleh pun masih belum andal. Terlebih lagi, karena entitas pesantren jenis ini umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program ketimbang mengurus administrasi. Untuk lebih jelasnya, hal ini tidak boleh dijadikan acuan yang dimana entitas nirlaba tidak boleh hanya menfokuskan pada kepercayaan yang diberikan para donaturnya akan tetapi, akuntabilitas sangat diperlukan agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada donatur dan publik secara umum (Miranti, 2013).

Rusdiyanto (2016) membuktikan bahwa pada laporan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Sendang Pragaan Sumenep Madura belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 sehingga akuntabilitas keuangan

belum dipercaya oleh para donatur untuk disalurkan kepada anak-anak Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep Madura. Kemudian, Julianto et al. (2017) menemukan hasil studi lapang yang sama bahwa Yayasan Al-Ma'ruf Samarinda selama ini belum mencatat nilai perolehan aset yang dimilikinya dan belum menilai penyusutan aset yang terjadi, namun baru mencatatnya hanya sebatas nama inventaris dan jumlah unitnya sehingga nilai aset tidak dapat dilaporkan keuangannya serta Yayasan Al-Ma'ruf Samarinda belum menerapkan penyusunan laporan sesuai dengan format laporan keuangan entitas nirlaba yang terdapat dalam PSAK No. 45, hal ini terlihat karena Yayasan Al-Ma'ruf Samarinda belum menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dibuat selama ini hanya berupa laporan penerimaan dan penggunaan dana. Selanjutnya, Fidiana (2018) juga mengemukakan bahwa Yayasan SMP Al Irsyad belum menyusun pelaporan keuangan berbasis PSAK No. 45. Pelaporan keuangan yang disediakan masih sangat sederhana, yaitu realisasi penerimaan SPP yang dibuat pada siklus bulanan serta realisasi penerimaan dan penggunaan Dana BOS yang disusun pada siklus 3 bulanan. Informasi keuangan yang tersedia juga belum membedakan pendapatannya berdasarkan pembatasan dari penyandang dana seperti pendapatan tidak terikat, pendapatan terikat sementara dan pendapatan terikat permanen. Berbeda dengan Rizky dan Padmono (2013) menyatakan bahwa Yayasan Masjid Al Falah telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PSAK No. 45 dimana yayasan tersebut menyusun empat laporan keuangan. Aset neto yayasan tidak dikelompokkan ke dalam tiga

bagian yaitu aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Laporan aktivitas telah diklasifikasikan sesuai dengan pembatasannya yaitu tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen yang sesuai dengan laporan aktivitas bentuk B pada PSAK No. 45. Laporan arus kas telah disusun sesuai dengan PSAK No. 45 dengan mengambil bentuk metode langsung pada penyusunannya. Catatan atas laporan keuangan yang disusun Yayasan Masjid Al Falah terdapat beberapa perbedaan yaitu, yayasan tidak mencatatkan penerimaan hibah atau wakaf yang telah diterima.

Berdasarkan kajian tersebut, diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berterima umum ini sangat penting untuk suatu entitas pesantren. Yayasan Pondok Aitam & Dhuafa' Nurul Karomah merupakan salah satu entitas pesantren yang memfasilitasi anak-anak yatim dan dhuafa' agar mempunyai kesempatan yang sama dengan anak lain untuk mengembangkan diri secara personal, akademis, dan keterampilan umum yang dimana untuk laporan keuangan pada pondok pesantren tersebut belum sepenuhnya menerapkan laporan keuangan yang sesuai standar berdasarkan standar akuntansi yang berterima umum, proses pembuatan laporan keuangan masih dilakukan secara sederhana, dokumen-dokumen pendukung dalam proses penyusunan laporan tersebut juga belum menggunakan bukti transaksi sendiri antara transaksi kas keluar dan transaksi kas masuk. Padahal, pedoman bagi pesantren bertujuan agar pondok pesantren dengan sifat dan karakteristik yang khas, mampu menyusun laporan keuangan sesuai berdasarkan standar akuntansi yang berterima umum. Oleh karena itu, perlu pembenahan dan perbaikan atas proses dalam setiap siklus yang terjadi

pada kegiatan keuangan Yayasan Pondok Aitam & Dhuafa' Nurul Karomah tersebut, maka penulis akan mengkaji ulang mengenai akuntabilitas penyusunan laporan keuangan entitas pesantren berdasarkan standar akuntansi yang berterima umum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren yaitu SAK ETAP sehingga diharapkan untuk kedepannya laporan keuangan yang ada pada pondok pesantren tersebut sudah menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berterima umum guna untuk kepentingan mewujudkan akuntabilitas pelaporan keuangan kepada para *stakeholder*.

### **1.2 Tujuan Tugas Akhir**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Penyajian Laporan Keuangan Entitas Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren SAK ETAP (Studi Kasus Pada Yayasan Pondok Aitam & Dhuafa' Nurul Karomah).

### **1.3 Manfaat Tugas Akhir**

Penelitian tugas akhir ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal. Bagi *stakeholder*, laporan keuangan terstandar dan layak diaudit merupakan bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengurus kepada publik. Bagi donatur, laporan akuntansi yang memuat informasi keuangan, kinerja, dan penggunaan sumber-sumber daya bermanfaat dalam menilai keberlangsungan entitas pesantren. Bagi pemerintah, pelaporan keuangan terstandar merupakan wujud kontribusi nyata

entitas pesantren secara nasional yang terukur (secara denominasi angka) dalam rangka pemberdayaan perekonomian di Indonesia. Bagi entitas pondok pesantren sendiri, penelitian tugas akhir ini diharapkan sebagai langkah awal entitas dalam menyiapkan pelaporan keuangan yang memadai dan terstandar, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia yang bisa dikembangkan lebih baik lagi. Penelitian tugas akhir ini juga diharapkan bagi mahasiswa dapat bermanfaat dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta dapat menerapkan ilmu tersebut berdasarkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan fakta yang terjadi. Kemudian, penelitian tugas akhir ini dapat menjadi bahan referensi pembelajaran maupun studi tugas selanjutnya bagi pembaca untuk memperoleh informasi mengenai akuntabilitas penyajian laporan keuangan entitas pesantren berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren SAK ETAP.

#### **1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir**

Penulis membatasi ruang lingkup kegiatan tugas akhir yang akan dilaksanakan dengan maksud agar dalam pembahasan pada laporan tugas akhir ini tidak keluar dari topik pembahasan utama, maka ruang lingkup ini dibatasi dan difokuskan pada Akuntabilitas Penyajian Laporan Keuangan Entitas Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren SAK ETAP.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk memperoleh informasi



yang dibutuhkan. Di dalam penelitian tugas akhir ini terdapat beberapa metode yang akan digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, metode-metode pengumpulan data tersebut yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada perusahaan terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti yang terjadi di kehidupan nyata. Observasi ini dilakukan penulis yang bertindak sebagai subjek yang melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang berhubungan dengan laporan keuangan yang ada di dalam entitas pondok pesantren kemudian mencatat dan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara percakapan secara langsung antara dua orang atau lebih, dengan menyampaikan atau mengajukan pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai pertanggungjawaban serta pengalokasian dana yang telah diterapkan pada perusahaan atas penyusunan laporan keuangan. Wawancara ini akan dilakukan dengan pihak yang berwenang dalam menangani kegiatan operasional pondok atas nama Hidayat sebagai sekretaris pondok pesantren, dan yang berwenang menangani penyusunan laporan keuangan yaitu *staff* bendahara atas nama Budi Setyawan, serta yang berwenang meneliti dan menandatangani laporan keuangan yang telah dibuat yaitu ketua pondok pesantren atas nama Ustadz. M. Nur Qomari, S. Ag.

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang menyediakan dokumen-dokumen baik berupa gambar, tulisan dan sebagainya. Metode ini digunakan penulis dalam mempelajari dan mengkaji bukti-bukti serta catatan yang ada dalam perusahaan sebagai bahan pendukung pengamatan yang dilakukan. Misalnya *company profile*, buku tabloid/bulan untuk para donatur, laporan penerimaan dan pengeluaran kas pondok pesantren periode 2018, serta file-file yang berhubungan dengan pencatatan akuntansi mengenai laporan keuangan tersebut. Dengan adanya dokumentasi diharapkan data yang diperoleh dapat lebih dipercaya karena disertai dengan pembuktian yang nyata.

